

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	peneliti	Judul penelitian	Fokus penelitian	Teori penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Mahardika, Tegarditasari, Untung Dwi Hananto, Indarja	Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata Di Kabupaten Banjarnegara (2014)	Bagaimana strategi pengaturan dan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Banjarnegara, Apa kendala yang dialami Disbudpar Kabupaten Banjarnegara dan Bagaimana mengatasi kendala yang ada	Strategi Pengembangan Pariwisata	Metode Deskriptif Analitis Dengan Metode Pendekatan Yuridis	Dalam meningkatkan PAD, Disbudpar Kabupaten Banjarnegara telah melakukan perbaikan sarana dan prasarana pariwisata yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Disbudpar Kabupaten Banjarnegara membebaskan tugas promosi wisata kepada Duta Pariwisata Kabupaten Banjarnegara agar lebih dikenal masyarakat. Pengembangan produk wisata tirta dan budaya serta produk berbasis wisata
						dan budaya serta produk

						<p>berbasis wisata-wisata agro dan rekreasi keluarga.</p> <p>Kendala yang dihadapi ialah, kurangnya SDM yang baik yang dimiliki kantor wisata, Minimnya anggaran dari Pemda, Kondisi Infrastruktur belum memadai.</p> <p>Untuk mengatasi kendala yang ada gerakan yang dilakukan adalah Menyusun Masterplan serta mengadakan SEMILOKA</p>
2	Rina Masrur oh, Neni Nurhayati	Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kuningan (2016)	Analisis strategi pengembangan pariwisata guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuningan	Strategi Pengembangan Pariwisata	Metode Deskriptif Analisis	<p>Kabupaten Kuningan sebagai daerah konservasi, pariwisata merupakan sektor utama yang harus dikembangkan. Kabupaten Kuningan harus memiliki kawasan unggulan destinasi wisata yang menjadi prioritas pengembangan dengan pertimbangan multiflyer efek secara ekonomi Strategi yang dapat dilakukan adalah</p>

						<p>komitmen pemerintah mengenai fokus pembangunan pariwisata daerah, meluncurkan konsep City branding sebagai ikon pariwisata yang khas, meningkatkan kemitraan dan hubungan antar lembaga dalam pengelolaan pariwisata, dukungan regulasi serta pengembangan Sumber Daya Manusia.</p>
3	<p>Susilawati, H. Mapamirning, Alimudin Said</p>	<p>Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Bira Sebagai sumber Unggulan Pendapatan Asli Di Daerah Kabupaten Bulukumba</p>	<p>Bagaimana strategi pengembangan pariwisata pantai Bira sebagai sumber unggulan pendapatan asli di daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 dan apa indicator strategi pengembangan pariwisata</p>	<p>Strategi Pengelolaan Pariwisata</p>	<p>kualitatif Metode</p>	<p>penyediaan fasilitas yang masih kurang seperti sarana dan prasarana masih terbatas, fasilitas pelayanan belum maksimal serta lingkungan dan kebersihan yang belum kondusif, belum maksimal upaya petugas kebersihan. Pantai Bira telah di promosikan sebagai obyek wisata pantai di seluruh lapisan masyarakat bahkan sampai ke mancanegara, obyek wisata pantai ini telah</p>

						dikenal dimana-mana bahkan sudah termasuk salah satu obyek wisata dunia. Fasilitas pelayanan di pantai Bira masih butuh pengembangan untuk menjadikan pantai Bira menjadi lebih maju
4	I Made Galih Aditya, Nyoman Mas Aryan	Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Sektor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung	Kontribusi pengembangan Desa Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung	Pengembangan Pariwisata	Metode penulisan Hukum Yuridis Empiris	Kontribusi retribusi usaha pariwisata pada Desa Wisata di Kabupaten Badung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung adalah pada tahun 2013 berkontribusi sebesar 0,0023 %, pada tahun 2014 sebesar 0,0004 % , pada tahun 2015 sebesar 0,0033% dan pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,0025 %.
5	Ni Komang Sri Wulan dari, Sigit Triandaru	Peran Sektor Pariwisata Dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan	Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah hotel, belanja modal, dan jumlah sarana	Pembangunan Daerah	Metode Kualitatif	Kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Apabila jumlah kunjungan

		Tahun 1990-2014	angkutan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan tahun 1990-2014			<p>wisatawan naik sebesar 1 orang maka akan mengakibatkan kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 0,000054 juta rupiah ceteris paribus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat akan diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jumlah hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jumlah sarana angkutan berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap pendapatan asli daerah. Apabila jumlah sarana angkutan naik sebesar 1 unit maka akan mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerah sebesar 0,000316 juta rupiah ceteris paribus</p>
--	--	-----------------	--	--	--	---

6	Ahmar, Nurlinda, Mustafa Muhanisi	Peranan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo	Pengembangan Pariwisata	Metode Kualitatif	retribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo adalah sebesar Rp.41,053 juta/tahun. Penerimaan retribusi pariwisata berpengaruh terhadap naik turunnya Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo sebesar 59,8% yaitu 77,3 persen menunjukkan bahwa antara kedua variable memiliki hubungan yang kuat dan positif. Besarnya pengaruh retribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo adalah sebesar Rp.41,053 juta/tahun. Penerimaan retribusi pariwisata berpengaruh terhadap naik turunnya Pendapatan Asli daerah. naik turunnya Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo sebesar 59,8 persen
7	M.Rantetadun	Analisis Pengaruh Dukungan	Berapa besar pengaruh	Pengembangan	Metode Kualitatif	Dukungan pemerintah untuk

	09	n Pemerintah Dan Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Nabire	dukungan Pemerintah dan Kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Nabire dan Bagaimana kah strategi Pengembangan obyek wisata Pesisir Pantai Nabire yang berkelanjutan	Pariwisata	pengembangan potensi wisata di Nabire, dilakukan melalui pembangunan fisik pada infrastruktur jalan, serta pembangunan non fisik yang dilaksanakan melalui pembinaan, kursus atau pelatihan dalam rangka meningkatkan potensi wisata manusia. sumber daya dan peningkatan propotion. Dukungan publik untuk pengembangan pariwisata di Nabire cukup tinggi, seperti makanan, kebersihan, keamanan lingkungan, promosi dan pelestarian. Simultan kunjungan wisata dan alokasi dana tidak berpengaruh pada pendapatan sektor pariwisata, tetapi dalam kunjungan wisatawan secara parsial ternyata berpengaruh pada pendapatan
--	----	--	---	------------	--

						pariwisata, di mana setiap pengunjung akan menyumbang Rp. 78.721
--	--	--	--	--	--	--

Pembaruan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat perbedaan pada tolok ukur penelitian, dimana pada penelitian ini lebih focus terhadap bagaimana pengelolaan objek pariwisata berjenis wisata budaya pada suatu daerah yang akan mempengaruhi peningkatan PAD. Sedangkan penelitian yang ada pada jurnal-jurnal rujukan, membahas tentang strategi apa yang dipakai dalam mengelola sebuah objek wisata.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pariwisata

Secara Etomooigi pariwisata berasal dari dua kata yaitu “pari” yang berarti banyak/berkeliling, sedangkan pengertian wisata berarti “pergi”. Didalam kamus besar indonesia pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Sedangkan pengertian secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Menurut (Yoeti, 1995 : 107), Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri (di luar negeri) meliputi pendiaman dari daerah lain (daerah tertentu, suatu negara atau suatu benua) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia bertempat tinggal.

Dalam pengertian kepariwisataan terdapat beberapa faktor penting yang mau tidak mau harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor yang dimaksud menurut Yoeti, (1995 : 109) antara lain :

1. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu
2. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain
3. Perjalanan itu, walaupun apa bentuknya, harus selalu dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi
4. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.

Adapun beberapa unsur yang ada dalam industri pariwisata saat ini, diantaranya seperti:

- a) Biro Perjalanan merupakan badan usaha dimana melayani semua proses perjalanan pariwisata sedak berangkat hingga kembali pulang, sehingga wisatawan mendapatkan kenyamanan selama perjalanan pariwisata.
- b) Akomodasi merupakan tempat untuk tinggal sementara atau lebih sering disebut dengan tempat menginap. Banyak sekali pilihan tempat menginap saat melakukan perjalanan wisata saat ini, misalnya tempat tersebut seperti hotel, perkemahan, motel, dan lain-lain. Saat ini semakin berkembang tempat untuk menginap terutama dalam segi fasilitas dan berbagai macam kebutuhan, seperti makan dan minum, fasilitas olah raga, fasilitas ruang pertemuan, fasilitas jamuan-jamuan, dan lain-lain. Karena semakin berkembangnya jaman dan teknologi maka kebutuhan para wisatawan-pun semakin banyak dan berkembang, sehingga harus di sediakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang akomodasi ini.
- c) Transportasi Merupakan industri pada pariwisata yang menyediakan jasa angkutan. Jasa transportasi ini mulai dari angkutan darat, laut dan juga udara. Pengelolaan jasa angkutan

ini banyak sekali mulai yang di kelola oleh pihak swasta sampai pemerintah. Jasa ini sangat berpengaruh bagi bidang pariwisata, karena dapat mempermudah untuk mencapai tempat tujuan wisata, saat ini banyak sekali jasa-jasa yang di tawarkan terutama dengan harga yang terjangkau.

- d) Jasa Boga dan Restoran Merupakan fasilitas dalam bidang makanan dan minuman ketika berwisata, saat ini industri jasa boga dan restoran dalam pariwisata sangat menguntungkan karena dalam setiap wisatawan pastinya selalu membutuhkan makanan dan minuman sehingga mereka pasti membelinya serta ingin mencoba berbagai jenis makanan maupun minuman daerah setempat. Dan makanan dan minuman ini biasanya sering dijadikan sebagai cinderamata atau oleh-oleh untuk di bawa pulang ke rumah.
- e) *Money Changer* / Tempat Penukaran Uang. Tempat untuk menukarkan mata uang asing saat ini semakin berkembang, penukaran mata uang asing tidak hanya dilakukan di bank saja tapi banyak sekali perusahaan yang tersebar di tempat tertentu, terutama di kota-kota besar yang menyediakan penukaran mata uang asing. Atraksi Wisata Merupakan pertunjukan yang di adakan di tempat-tempat wisata. Pertunjukan tersebut misalnya seperti tarian, musik, dan lain-lain. Pertunjukan dapat dilakukan secara tradisional maupun secara modern, melalui industri atraksi wisata maka dapat meningkatkan keunggulan daerah wisata setempat sehingga dikenal oleh banyak orang.
- f) Oleh-Oleh atau Cindera Mata Industri. cindera mata sangat menjanjikan di daerah tempat wisata, karena setiap orang yang berwisata umumnya selalu membeli cindera mata untuk di bawa pulang ke rumah. Cindera mata ini umumnya berupa benda kerajinan tangan khas daerah setempat.

Menurut Pendit (1994) pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat pariwisata tersebut. Jenis-jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wisata Budaya

Yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka. Seiring perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan–kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan–kegiatan budaya, seperti pameran seni (seni tari, seni drama, seni musik, dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya.

2. Wisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olah raga di air, lebih–lebih di danau, pantai, teluk, atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, melihat–lihat taman laut dengan pemandangan indah di bawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan didaerah–daerah atau negara–negara maritim, di Laut Karibia, Hawaii, Tahiti, Fiji dan sebagainya. Di Indonesia banyak tempat dan daerah yang memiliki potensi wisata maritim ini, seperti misalnya Pulau–pulau Seribu di Teluk Jakarta, Danau Toba, pantai Pulau Bali dan pulau–pulau kecil disekitarnya, taman laut di Kepulauan Maluku dan sebagainya. Jenis ini disebut pula wisata tirta.

3. Wisata Cagar Alam (Taman Konservasi)

Untuk jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha–usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang–undang. Wisata cagar alam ini banyak dilakukan oleh para penggemar dan pecinta alam dalam kaitannya dengan kegemaran memotret binatang atau marga satwa serta pepohonan kembang beraneka warna yang memang mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat. Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang dan marga satwa yang langka serta tumbuh–tumbuhan yang jarang terdapat di tempat–tempat

lain. Di Bali wisata Cagar Alam yang telah berkembang seperti Taman Nasional Bali Barat dan Kebun Raya Eka Karya

4. Wisata Konvensi

Yang dekat dengan wisata jenis politik adalah apa yang dinamakan wisata konvensi. Berbagai negara pada dewasa ini membangun wisata konvensi ini dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jerman Barat misalnya memiliki Pusat Kongres Internasiona (International Convention Center) di Berlin, Philipina mempunyai PICC (Philippine International Convention Center) di Manila dan Indonesia mempunyai Balai Sidang Senayan di Jakarta untuk tempat penyelenggaraan sidang-sidang pertemuan besar dengan perlengkapan modern. Biro konvensi, baik yang ada di Berlin, Manila, atau Jakarta berusaha dengan keras untuk menarik organisasi atau badan-badan nasional maupun internasional untuk mengadakan persidangan mereka di pusat konvensi ini dengan menyediakan fasilitas akomodasi dan sarana pengangkutan dengan harga reduksi yang menarik serta menyajikan program-program atraksi yang menggiurkan.

5. Wisata Pertanian (Agrowisata)

Sebagai halnya wisata industri, wisata pertanian ini adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayur-mayur dan palawija di sekitar perkebunan yang dikunjungi.

6. Wisata Buru

Jenis ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan, seperti berbagai negeri di Afrika untuk berburu gajah, singa, ziraf, dan

sebagainya. Di India, ada daerah–daerah yang memang disediakan untuk berburu macan, badak dan sebagainya, sedangkan di Indonesia, pemerintah membuka wisata buru untuk daerah Baluran di Jawa Timur dimana wisatawan boleh menembak banteng atau babi hutan.

7. Wisata Ziarah

Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata ziarah banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat–tempat suci, ke makam–makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda. Wisata ziarah ini banyak dihubungkan dengan niat atau hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman dan tidak jarang pula untuk tujuan memperoleh berkah dan kekayaan melimpah. Dalam hubungan ini, orang–orang Khatolik misalnya melakukan wisata ziarah ini ke Istana Vatikan di Roma, orang–orang Islam ke tanah suci, orang–orang Budha ke tempat–tempat suci agama Budha di India, Nepal, Tibet dan sebagainya. Di Indonesia banyak tempat–tempat suci atau keramat yang dikunjungi oleh umat–umat beragama tertentu, misalnya seperti Candi Borobudur, Prambanan, Pura Basakih di Bali, Sendangsono di Jawa Tengah, makam Wali Songo, Gunung Kawi, makam Bung Karno di Blitar dan sebagainya. Banyak agen atau biro perjalanan menawarkan wisata ziarah ini pada waktu–waktu tertentu dengan fasilitas akomodasi dan sarana angkutan yang diberi reduksi menarik ke tempat–tempat tersebut di atas.

2.2.2 Objek Wisata Dan Daya Tarik Wisata

Unsur penting dalam dunia kepariwisataan adalah terletak pada objek dan daya tarik wisata. Dimana objek dan daya tarik wisata dapat melestarikan adat dan budaya bangsa sebagai aset yang dapat dijual kepada wisatawan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Objek wisata dan daya tarik wisata dapat berupa alam, budaya, tata hidup serta daya tarik yang lainnya yang memiliki nilai jual untuk dinikmati oleh wisatawan atau daya tarik dan nilai jual yang bisa dinikmati oleh wisatawan.

Wisata merupakan suatu proses bepergian yang bersifat sementara yang dilakukan seseorang untuk menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Motif kepergiannya tersebut bisa karena kepentingan ekonomi, kesehatan, agama, budaya, sosial, politik, dan kepentingan lainnya (Gamal : 2004). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan, Daya Tarik Wisata dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan sedangkan wisata menurut Undang-Undang No 10 th 2009 wisata yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan manusia baik perorangan maupun kelompok untuk mengunjungi destinasi tertentu dengan tujuan rekreasi, mempelajari keunikan daerah wisata, pengembangan diri dan sebagainya dalam kurun waktu yang singkat atau sementara waktu.

Pengertian obyek dan daya tarik wisata menurut Marpaung (2002:78) adalah suatu bentukan dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Obyek dan daya tarik wisata sangat erat hubungannya dengan travel motivation dan travel fashion, karena wisatawan ingin mengunjungi serta mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya.

Obyek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri pariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan (*something to see*). Diluar negri obyek wisata disebut *tourist attraction* (atraksi wisata), sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan objek wisata. Mengenai pengertian objek wisata, kita dapat melihat dari beberapa sumber antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No.24/1979. Objek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi.
2. Surat Keputusan Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No.KM 98/PW:102/MPPT-87. Obyek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai

daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Suatu obyek wisata dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya, menurut Maryani (1991:11) syarat-syarat tersebut adalah :

1. *What to see.*

Di tempat tersebut harus ada obyek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Dengan kata lain daerah tersebut harus memiliki daya tarik khusus dan atraksi budaya yang dapat dijadikan "entertainment" bagi wisatawan.

2. *What to do*

Meliputi pemandangan alam, kegiatan kesenian, dan atraksi wisata. *What to do.* Di tempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lamadi tempat itu.

3. *What to buy.*

Tempat tujuan wisata harus tersedia fasilitas untuk berbelanja terutama barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk di bawa pulang ke tempat asal.

4. *What to arrived*

Di dalamnya termasuk aksesibilitas, bagaimana kita mengunjungi obyek wisata tersebut, kendaraan apa yang akan digunakan, dan berapa lama tiba ketempat tujuan wisata tersebut.

5. *What to stay*

Bagaimana wisatawan akan tinggal untuk sementara selama dia berlibur di obyek wisata itu. Diperlukan penginapan-penginapan baik hotel berbintang atau hotel non berbintang dan sebagainya.

2.2.3 Pengembangan Pariwisata

Mengembangkan pariwisata sangat diperlukan upaya-upaya dalam mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata serta melakukan pengintegrasian segala bentuk aspek

diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung keberlangsungan pengembangan pariwisata.

Pembangunan ekonomi disuatu daerah sering kali di hubungkan dengan pembangunan pada sektor pariwisata pada setiap Daerah. Industri pariwisata memiliki hubungan multi dimensi yang tidak hanya berkaitan erat dengan bidang ekonomi saja namun hampir setiap industri pariwisata berhubungan erat dengan pembangunan nasional. Aktifitas kepariwisataan sudah seharusnya menjadi sasaran pemerintah di setiap daerah untuk di kembangkan secara optimal mengingat pada sektor pariwisata menduduki peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

James J. Spillane (1987) mengemukakan bahwa pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, dan lain-lain. Menurut James J. Spillane (1987) terdapat aspek-aspek industri pariwisata yang mempengaruhi pengembangan pariwisata, yaitu :

1. Attractions (daya tarik)

Attractions dapat digolongkan menjadi dua yaitu site attractions dan event attractions. Site attractions merupakan daya tarik fisik yang permanen dengan lokasi yang tetap seperti kebun binatang, keraton dan museum. Sedangkan event attractions adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat dipindah dengan mudah seperti festival, pameran atau pertunjukan kesenian daerah. ciri-ciri khas yang menarik wisatawan meliputi :

- Keindahan alam
- Iklim dan cuaca
- Kebudayaan
- Sejarah
- Ethnicity sifat kesukuan

- Accessibility, kemampuan atau kemudahan berjalan atau ketempat tertentu
2. Facilities (fasilitas-fasilitas yang diperlukan)

Fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik disuatu lokasi karena fasilitas harus terletak dengan pasarnya. Selama tinggal ditempat tujuan wisata wisatawan memerlukan tidur, makan dan minum oleh karena itu sangat dibutuhkan fasilitas penginapan. Selain itu ada kebutuhan akan support industries seperti toko souvenir, cuci pakaian, pemandu, dan fasilitas rekreasi.

3. Infrastructure (infrastruktur)

Daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. Perkembangan infrastruktur perlu untuk mendorong perkembangan pariwisata. Infrastruktur dari suatu daerah sebenarnya dinikmati baik oleh wisatawan maupun masyarakat yang juga tinggal didaerah wisata, maka penduduk akan mendapatkan keuntungan. Pemenuhan atau penciptaan infrastruktur adalah suatu cara untuk menciptakan suasana yang cocok bagi perkembangan pariwisata. Yang termasuk infrastruktur penting dalam pariwisata adalah :

- a. Sistem pengairan/air

Kualitas air yang cukup sangat esensial atau sangat diperlukan.

- b. Sumber listrik dan energi

Suatu pertimbangan yang penting adalah penawar tenaga energi yang tersedia pada jam pemakaian yang paling tinggi atau jam puncak (*peak hours*). Ini diperlukan supaya pelayanan yang ditawarkan terus menerus.

- c. Jaringan komunikasi

Walaupun banyak wisatawan ingin melarikan diri dari situasi biasa yang penuh dengan ketegangan, sebagian masih membutuhkan jasa jasa telepon dan telegram yang tersedia.

- d. Sistem pembuangan kotoran

pembuangan air. Kebutuhan air untuk pembuangan kotoran memerlukan kira-kira 90% dari permintaan akan air. Jaringan saluran harus didesain berdasarkan permintaan puncak atau permintaan maksimal.

e. Jasa-jasa kesehatan

Jasa kesehatan yang tersedia akan tergantung pada jumlah tamu yang diharapkan, umumnya, jenis kegiatan yang dilakukan atau faktor-faktor geografis lokal.

f. Jalan-jalan/jalan raya

Ada beberapa cara membuat jalan raya lebih menarik bagi wisatawan :

1. Menyediakan pemandangan yang Was dari alam semesta.
2. Membuat jalan yang naik turun untuk variasi pemandangan .
3. Mengembangkan tempat dengan pemandangan yang indah .
4. Membuat jalan raya dengan dua arah yang terpisah tetapi sesuai dengan keadaan tanah.
5. Memilih pohon yang tidak terlalu lebat supaya masih ada pemandangan yang indah.

4. Transportations (transportasi)

Dalam pariwisata kemajuan dunia transportasi atau pengangkutan sangat dibutuhkan karena sangat menentukan jarak dan waktu dalam suatu perjalanan wisata. Transportasi baik darat, udara maupun laut merupakan suatu unsur utama langsung yang merupakan tahap dinamis gejala-gejala pariwisata. Ada beberapa usul mengenai pengangkutan dan fasilitas yang dapat menjadi semacam pedoman termasuk :

- a. Informasi lengkap tentang fasilitas, lokasi terminal, dan pelayanan pengangkutan lokal ditempat tujuan harus tersedia untuk semua penumpang sebelum berangkat dari daerah asal.
- b. Sistem keamanan harus disediakan di terminal untuk mencegah kriminalitas.
- c. Suatu sistem standar atau seragam untuk tanda-tanda lalu lintas dan simbol-simbol harus dikembangkan dan dipasang di semua bandara udara.

- d. Sistem informasi harus menyediakan data tentang informasi pelayanan pengangkutan lain yang dapat dihubungi di terminal termasuk jadwal dan tarif.
 - e. Informasi terbaru dan sedang berlaku, baik jadwal keberangkatan atau kedatangan harus tersedia di papan pengumuman, lisan atau telepon.
 - f. Tenaga kerja untuk membantu para penumpang.
 - g. Informasi lengkap tentang lokasi, tarif, jadwal, *rute* dan pelayanan pengangkutan lokal.
 - h. Peta kota harus tersedia bagi penumpang.
5. Hospitality (keramahtamahan)

Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal memerlukan kepastian jaminan keamanan khususnya untuk wisatawan asing yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan didatangi. Maka kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan harus disediakan dan juga keuletan serta keramahtamahan tenaga kerja wisata perlu dipertimbangkan supaya wisatawan merasa aman dan nyaman selama perjalanan wisata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 8 tentang pembangunan kepariwisataan menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Keterlibatan Pemerintah dalam membangun dan mengembangkan pariwisata sangat berperan penting karena dalam hal ini pemerintah merupakan motor penggerak untuk kesuksesan berjalannya pembangunan serta pengembangan dalam sektor pariwisata. Selain itu juga diperlukan dukungan dari berbagai pihak dalam dunia pariwisata yang memiliki banyak fungsi dan kegunaan untuk masyarakat. Peran pemerintah kabupaten Lamongan dalam mengembangkan pariwisata adalah menjalin kemitraan dengan instansi-instansi terkait, stakeholder, dan dengan masyarakat-masyarakat sekitar objek wisata serta mempromosikan objek wisata. Kemitraan publik dengan swasta di atur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

pasal 195 bahwa Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Departemen/ Lembaga, Non Departemen atau dengan sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, Koperasi, Yayasan dan lembaga lainnya yang didalam Negeri yang berbadan hukum. Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah ini telah membuka kesempatan untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan pelayanan publik. adanya kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dengan melihat keterbatasan Pemerintah Daerah dalam penyediaan dana untuk pembangunan infrastruktur dan dalam rangka pemberdayagunaan barang milik Daerah khususnya barang milik Daerah yang berupa tanah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menyelenggarakan kemitraan dengan swasta dalam pengembangan pariwisata.

Peraturan tentang pembangunan pariwisata di cantumkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang usaha pariwisata, rekreasi dan hiburan umum di Kabupaten Lamongan Nomor 01 tahun 2005 yang menyatakan bahwa usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah lamongan meliputi :

- a. Jasa Biro Perjalanan Wisata, yaitu kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
- b. Jasa Agen Perjalanan Wisata, yaitu kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara didalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
- c. Usaha Jasa Pramuwisata, yaitu kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
- d. Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran, yaitu usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (Negarawan, usahawan,

cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama).

- e. Jasa Impresariat, yaitu kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, serta menentukan tempat waktu dan jenis hiburan.
- f. Jasa Konsultasi Pariwisata, yaitu kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistimatis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli professional.
- g. Jasa Informasi Pariwisata, yaitu usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisata.

Pengembangan pariwisata menurut Pearce (1981:12) dapat diartikan sebagai “usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat”. Menurut Yoeti (1992), sarana wisata dapat dibagi menjadi tiga unsur pokok, diantaranya :

1. Sarana pokok pariwisata, adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya tergantung pada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata. Termasuk dalam kelompok ini adalah *travel agent*, perusahaan-perusahaan angkutan wisata, serta jenis akomodasi lainnya, restoran dan rumah makan lainnya serta obyek wisata dan atraksi wisata.
2. Sarana pelengkap kepariwisataan adalah perusahaan atau tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan, tetapi yang terpenting adalah menjadikan para wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata.
3. Sarana penunjang kepariwisataan adalah perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok dan berfungsi tidak hanya membuat para wisatawan betah pada suatu daerah tujuan wisata tetapi fungsi yang lebih penting adalah agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjunginya.

Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan pada empat prinsip dasar, yaitu:

- a. Kelangsungan ekologi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin agar terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumberdaya alam yang akan menjadi daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan sungai.
- b. Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat setempat sebagai identitas masyarakat tersebut.
- c. Kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.
- d. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata

Agar pengembangan pariwisata dapat berkelanjutan, maka perlu diperhatikan kode etik pengembangan pariwisata seperti yang ditetapkan dalam konferensi pariwisata tahun 1999 yang mengatur etika global pariwisata untuk menjamin sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan kepariwisataan dan melindungi lingkungan dari dampak buruk kegiatan bisnis pariwisata (kartawan : 2004; Waluyo : 2007). Adapun kode etik dalam pengembangan pariwisata global ini, dapat dilihat seperti penjelasan dibawah ini :

1. Kewajiban Pemerintah
 - a. Melakukan perlindungan terhadap wisatawan dan pemberian kemudahan dalam penyediaan informasi.
 - b. Penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya.
 - c. Kebijakan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

- d. Kebijakan dan kegiatan pariwisata harus diarahkan dalam rangkaian : (a) penghormatan, perlindungan, pemeliharaan terhadap warisan kekayaan seni, arkeologi, budaya, monumen, tempat suci, museum, tempat bersejarah; (b) kelangsungan hidup dan berkembangnya hasil-hasil budaya, seni tradisional dan seni rakyat.
 - e. Menjaga kelestarian lingkungan alam, dalam perspektif pertumbuhan ekonomi yang sehat berkelanjutan dan berkesinambungan.
2. Kewajiban dan hak usaha pariwisata
 - a. Kewajiban:
 1. Memberikan informasi yang objektif tentang tempat-tempat tujuan dan kondisi perjalanan pada para wisatawan.
 2. Memperhatikan keamanan, keselamatan dan mengusahakan adanya sistem asuransi bagi para wisatawan.
 3. Harus melakukan studi tentang dampak rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup dan alam sekitar
 - b. Hak:
 1. Pajak-pajak dan beban-beban khusus yang memberatkan bagi industri pariwisata serta merugikan dalam persaingan harus dihapuskan atau diperbaiki secara bertahap.
 2. Pengusaha dan penanam modal terutama dari kalangan perusahaan kecil dan menengah berhak mendapat kemudahan akses memasuki sektor wisata.
 3. Kewajiban dan Hak Masyarakat
 - a. Kewajiban: Harus belajar untuk mengerti dan menghormati para wisatawan yang mengunjungi mereka.
 - b. Hak:
 1. Penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan, dan secara adil menikmati keuntungan ekonomis, sosial dan budaya yang mereka usahakan, dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
 2. Wisata alam dan wisata eko sebagai bentuk kegiatan pariwisata dapat memperkaya dan meningkatkan penghasilan, apabila dikelola dengan menghormati lingkungan alam dan melibatkan penduduk setempat.

Dengan demikian, dalam pengembangan industri pariwisata juga harus memperhatikan etika global pariwisata. selain itu juga pengembangan pariwisata harus berkaca pada tiga dimensi kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber daya alam), dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas hidup serta perlu didukung dengan perencanaan yang matang.

Berdasarkan penjelasan tentang pengembang pariwisata yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menggunakan teori pengembangan pariwisata yang dikemukakan oleh Robert Christie Mill (2000: 168), “Pengembangan pariwisata adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan permasalahan”. Menurut Robert Christie Mill untuk mengembangkan pariwisata memfokuskan pada empat analisa yaitu :

1. Analisa Pasar

- a. Inventaris daya tarik wisatawan

Tujuan inventaris adalah merangkum pembangunan pariwisata di sebuah kawasan, karena harus diketahui objek wisata apa yang dimiliki sehingga bisa menarik wisatawan datang. Salah satu cara untuk menentukan subyek ini adalah membedakan antara daya tarik inti dan daya tarik pendukung. Daya tarik inti merupakan alasan utama mengapa wisatawan mau datang ketempat itu. Daya tarik inti bisa berupa daya tarik alam seperti iklim, flora dan fauna, ciri lingkungan alam khusus, goa, jeram niaga, panorama alam. Daya tarik budaya seperti monumen purbakala, sejarah dan budaya, seni, kerajinan dan arsitektur lokal, festival budaya, keramahan penduduk. Sedangkan daya tarik pendukung adalah daya tarik yang dibangun disekeliling daya tarik inti, daya tarik pendukung berupa jenis atraksi khusus, seperti taman hiburan, pusat perbelanjaan, rekreasi dan fasilitas olahraga.

- b. Inventaris fasilitas untuk wisatawan

Tujuan dari inventaris fasilitas untuk wisatawan ini adalah melakukan pendataan terhadap fasilitas-fasilitas yang sudah ada bagi wisatawan dikawasan objek wisata dan yang belum ada sehingga harus dibangun untuk para wisatawan seperti : tempat penginapan, akomodasi, tempat penjualan makanan dan minuman, fasilitas kesehatan, keamanan, informasi wisata, jaringan telekomunikasi, pompa bensin, listrik dan toko- toko eceran para wisatawan.

c. Modal transportasi

Tanpa dihubungkan dengan jaringan transportasi tidak mungkin sesuatu objek wisata mendapat kunjungan wisatawan. Objek wisata merupakan akhir perjalanan wisata dan harus memenuhi syarat-syarat aksesibilitas, artinya objek wisata harus mudah dicapai dan dengan sendirinya juga mudah ditemukan. Jalan merupakan jalan akses yang harus berhubungan dengan jalan prasarana umum. Kondisi jalan umum dan jalan akses merupakan syarat yang penting sekali dan menentukan aksesibilitas suatu objek wisata.

d. Pasar Pasar wisata

secara faktual dapat dimaknai sebagai unsur-unsur industri yang sering disebut para pelaku pariwisata, seperti melakukan promosi wisata, penyedia informasi wisata, biro perjalanan, transportasi, pengurusan visa, jasa atraksi, hotel, restoran serta mekanisme yang mempertemukan permintaan dan penawaran produk dan jasa wisata. Oleh karena itu pemasaran memainkan peranan penting dalam pariwisata karena pelanggan melihat, merasa atau mencoba produk yang akan dibelinya. Untuk dapat menilai suatu produk seseorang harus berpergian ke tempat tujuan. Karena itu fokus pemasaran pariwisata adalah mengkomunikasikan secara keseluruhan alam maupun fasilitas pendukung yang disediakan dikawasan objek wisata, karena merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keputusan konsumen atau wisatawan.

2. Analisa Teknik dan Perencanaan

a. Komunikasi dan transportasi

Ketersediaan secara komunikasi seperti telepon umum, pelayanan pos, serta terjangkau oleh signal komunikasi dan kondisi sarana transportasi seperti jalan-jalan menuju objek wisata sehingga bisa sampai dan keluar dari tempat tujuan wisata dengan mudah.

b. Ketersediaan lahan untuk pariwisata

Dalam pengembangan daya tarik dan fasilitas pariwisata membutuhkan tersedianya lahan yang cukup di daerah kawasan tujuan wisata sehingga diketahui lahan yang tersedia siapa pemilinya serta apakah pemiliknya mau menjual atau mengizinkan pembangunan di atas tanahnya.

c. Aspek lingkungan dan ekologis

Setiap pembangunan yang besar membutuhkan sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan akibat terhadap lingkungan.

Karena kawasan lingkungan wisata yang berhasil tergantung kualitas lingkungan kawasan secara fisik.

3. Analisa Sosio-ekonomi

a. Penduduk setempat

1. Pariwisata akan mempengaruhi kehidupan penduduk dikawasan tersebut karena akan lebih banyak pengunjung datang kekawasan tersebut. Masalahnya adalah menentukan sikap umum penduduk dikawasan tempat pengembangan atau pembangunan pariwisata.
2. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kepada kelompok atau komunitas masyarakat dikawasan wisata sebagai bagian dari program pengembangan pariwisata.
3. Berhubungan dengan peran penduduk setempat sebagai bagian dari produk wisata. Seringkali keramahan penduduk lokal adalah daya tarik utama itu sendiri.

b. Produk dan pelayanan pendukung

Pariwisata membutuhkan banyak sistem pendukung seperti makanan, arena bermain, peralatan tidur, perabot, perlengkapan permanen lainnya. Untuk memaksimalkan dampak positif pariwisata terhadap ekonomi, dan hubungan dengan sektor-sektor ekonomi lain yang harus didorong. Pada titik ini yang penting untuk diketahui adalah apakah dikawasan wisata tersebut tersedia produk dan pelayanan pendukung serta sumber tenaga kerja dari lokal atau luar.

4. Analisa bisnis dan hukum

Tujuan analisis ini adalah menenukan perlu atau tidaknya diadakan perubahan suasana bisnis dan hukum bagi keberhasilan pengembangan pariwisata. Kegiatan ini harus meliputi masalah-masalah bisnis dan hukum yang berhubungan dengan pariwisata.

a. Lingkungan bisnis

Lingkungan bisnis pariwisata meliputi bisnis yang mempunyai hubungan dengan pariwisata, sektor publik, dan organisasi kemasyarakatan serta pelayanan yang diberikan oleh kelompok masyarakat. Lingkungan bisnis meliputi :

1. Bagaimana sikap sektor-sektor swasta, pemerintah, instansi-instansi terkait terhadap peningkatan pariwisata?

2. Apa sekarang yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pariwisata? Serta sikap lembaga keuangan terhadap pariwisata, seperti pemberian insentif keuangan dari lembaga keuangan yang berguna untuk pengembangan pariwisata seperti pemberian pinjaman.

- b. Ruang lingkup hukum

Aturan pemerintah sangat mempengaruhi semua bisnis, dan bisnis termasuk juga pariwisata. Tujuan analisis ini adalah menentukan kemana arah pemerintah mempengaruhi pengembangan pariwisata dan juga mengidentifikasi landasan hukum atau aturan-aturan, baik itu Undang-undang maupun Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman dalam pengembangan pariwisata. Analisa ini berfungsi sebagai pedoman bagi para pengembang pariwisata atau pihak swasta dalam melewati aturan-aturan resmi yang rumit dan mempengaruhi dalam pengembangan pariwisata.

Adapun alasan peneliti menggunakan teori dari konsep pengembangan pariwisata yang dikemukakan oleh Robert Christie Mill tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan pariwisata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dan agar pengembangan wisata dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan konsep pengembangan pariwisata, yang terdiri dari analisa pasar, analisa teknik dan perencanaan, analisa sosio-ekonomi, analisa bisnis dan hukum, karena konsep tersebut sebagai penunjang keberhasilan pengembangan wisata yang dilakukan di suatu daerah tujuan wisata.

2.2.4 Otonomi Daerah

Ketetapan MPR RI nomor XV/MPR/1998 tentang peyelenggaraan otonomi daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-undang otonomi daerah tersebut dijelaskan tentang pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom di sebut dengan desentralisasi. Dimana desentralisasi merupakan perpindahan kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi publik. perpindahan ini

dilakukan dari pemerintah pusat kepihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada swasta.

Penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri dilakukan oleh Lembaga-Lembaga pemerintah, yaitu Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dan DPRD (Propinsi, Kabupaten/Kota) dan birokrasi setempat yang terpisah dari lembaga-lembaga pemerintah dan birokrasi pemerintah.

Otonomi daerah sangat erat kaitannya dengan keuangan suatu daerah. Oleh sebab itu hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. Pendapatan Asli Daerah akan membawa implikasi tersendiri, dan bagi suatu daerah yang terbatas sumber daya alamnya maka akan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya.

2.2.5 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, oleh Ahmad Yani (2002 : 203) Pendapatan Asli Daerah diartikan “Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Telah dibuat Undang-Undang no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terjadi perubahan kebijakan di tingkat Nasional dimana sistem Pemerintahan Negara yang awalnya sentralistik mulai bergeser ke arah desentralisasi. Pemerintah daerah mendapatkan mandat dari Pemerintah Pusat dengan kewenangan dan keleluasaan yang cukup besar dalam penyelenggaraan otonomi Daerah yang nyata, lugas dan bertanggung

jawab. Hal ini mempunyai dampak yang cukup besar terhadap sumber-sumber penerimaan Daerah terutama yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah.

sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu :

Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
2. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa,

menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
5. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
6. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan perauran perundangan-undangan yang berlaku.

Pajak daerah dan retribusi daerah sudah diatur dalam Undang-Undang di laksanakan di Daerah dengan diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah. pemerintah daerah harus mentaati aturan Undang-Undang yang sudah di buat dengan tidak melakukan pungutan di luar yang sudah ditetapkan Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Mardiasmo (2011:100), retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pembayaran atas pemanfaatan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Menurut Siahaan (2005:5), retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat

dikatakan bersifat langsung yaitu yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

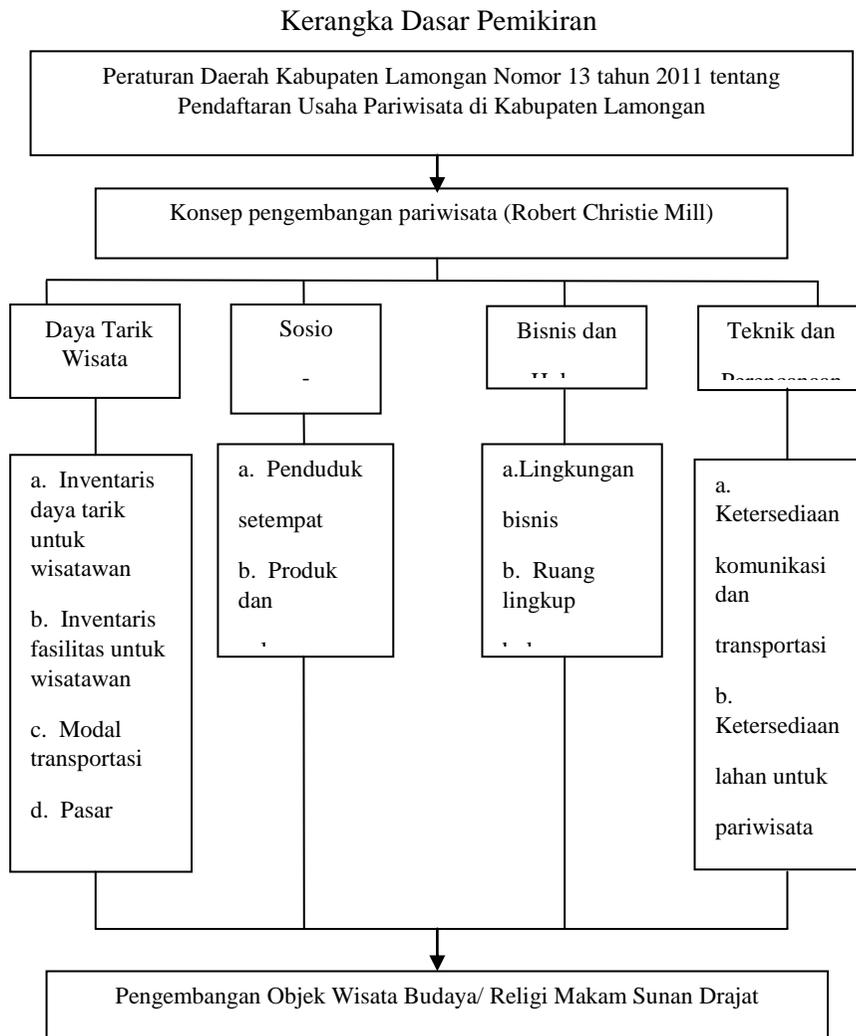
Ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut (Siahaan, 2010:6):

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- 4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- 5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari sektor Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Bahwa ketentuan mengenai besaran tarif dan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial dan kondisi perekonomian saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah

2.3 Kerangka Dasar Pemikiran

Gambar 2.1



Penelitian ini menghasilkan hipotesa yang kemungkinan akan muncul ketika penelitian ini dilakukan.

1. Pengembangan objek wisata religi makam Sunan Drajat berhasil sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan
2. Pengembangan objek wisata religi makam Sunan Drajat tidak berhasil sehingga kurang memberikan dampak positif pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.